

Filsafat Budaya Bangsa dan Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Moral di Mandailing Natal

Riska Aisyah Putri¹, Miftahurrohmah², Husnul Khotimah³,
Saidah Putri⁴, Ikhdina Silmi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal

e-mail: riskaaisyahputri02803@gmail.com¹, mimipyaa6@gmail.com², husnulkhotima.241214@gmail.com³,
saidahputri91@gmail.com⁴, ikh dinasilmi86@gmail.com⁵

*Riska Aisyah Putri

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara filsafat budaya bangsa dan implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan moral yang dihadapi masyarakat di Mandailing Natal. Masyarakat di daerah ini menghadapi sejumlah permasalahan moral, termasuk ketidakadilan sosial, konflik antar kelompok dan konflik antar sesama, serta penurunan nilai-nilai etika yang membahayakan keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, filsafat budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dapat memberikan solusi dalam memperbaiki keadaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, dapat mengatasi masalah moral di Mandailing Natal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal Mandailing Natal dengan Pancasila dapat memperkuat moralitas masyarakat dan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih adil erat dan harmonis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menjadikan gambaran dalam upaya penguatan nilai moral di Mandailing Natal melalui penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Keywords: Filsafat Budaya, Nilai Pancasila, Permasalahan Moral

Abstract : This study aims to analyze the relationship between the philosophy of national culture and the implementation of Pancasila values in overcoming moral problems faced by the community in Mandailing Natal. The community in this area faces a number of moral problems, including social injustice, inter-group conflict, and a decline in ethical values that endanger social harmony. In this context, the philosophy of national culture based on Pancasila can provide a solution to improve this situation. This study uses a descriptive qualitative approach to explore how the application of Pancasila values, such as social justice, unity, and humanity, can overcome moral problems in Mandailing Natal. The research findings show that the integration of local values of Mandailing Natal with Pancasila can strengthen community

Article submission: 21 August 2025

Article revision: 30 August 2025

Article acceptance: 04 September 2025

morality and encourage the creation of a more just and harmonious social life. This study is expected to provide insight into efforts to strengthen moral values in Mandailing Natal through the application of Pancasila values in everyday life.

Keywords : Philosophy of Culture, Pancasila Values, Moral Issues

I. INTRODUCTION

Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran dari beberapa kelompok tertentu, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam membangun negara yang kokoh dengan dasar ideologis. Hal ini menjadikan Pancasila relevan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia yang sudah resmi disahkan secara langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bertepatan disahkannya pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Filsafat budaya merupakan bidang kajian yang mempelajari nilai, makna, dan hakikat budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Budaya tidak hanya mencakup tradisi dan adat istiadat, tetapi juga menjadi refleksi dari cara pandang masyarakat terhadap realitas. Menurut Koentjaraningrat (1985), budaya adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Sementara itu, K. Bertens (2001) menjelaskan bahwa filsafat budaya berusaha memahami esensi dari fenomena budaya serta nilai-nilai yang mendasarinya dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks Indonesia, budaya bangsa berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang tidak hanya berperan sebagai dasar negara tetapi juga sebagai panduan etis dalam kehidupan bermasyarakat. Notonagoro (1975) menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan filsafat yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi penting untuk

diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan moral yang muncul di berbagai daerah, termasuk di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Mandailing Natal adalah wilayah yang memiliki tradisi budaya lokal yang kuat, seperti sistem Dalihan Na Tolu, yang mengutamakan nilai persaudaraan, keharmonisan, dan gotong royong. Namun, tantangan modern seperti konflik sosial, lemahnya solidaritas, dan penurunan moralitas menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai budaya dan Pancasila sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat . Implementasi nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi relevan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebagaimana juga ditekankan oleh Kaelan (2013), yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara filsafat budaya dan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan moral di Mandailing Natal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana filsafat budaya dan Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif untuk membangun masyarakat yang bermoral dan harmonis di kalangan masyarakat.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pemahaman masyarakat Mandailing Natal tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi permasalahan moral. Metode ini dipilih karena mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pandangan, sikap, dan praktik sosial yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan deksriptif, dan peneliti memfokuskan penelitian teoritis dari berbagai sumber jurnal, artikel dan buku.

III. RESULTS

A. Pengertian Filsafat Budaya Bangsa

Filsafat budaya bangsa merupakan cabang filsafat yang membahas tentang kebudayaan dalam konteks nilai-nilai yang menjadikan ciri khas dari suatu bangsa. Kajian ini bertujuan memahami makna kebudayaan sebagai identitas kolektif suatu

bangsa, baik dalam hal sistem nilai, norma, tradisi, maupun cara berpikir masyarakat di lingkungannya.

Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar." Dalam filsafat budaya bangsa, pandangan ini diterjemahkan sebagai kebudayaan yang tidak hanya menggambarkan kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga menjadi penanda identitas dari bangsa di tengah bangsa-bangsa lain.

Sementara itu, menurut K. Bertens (2006) menyatakan bahwa filsafat budaya adalah refleksi kritis terhadap nilai-nilai kebudayaan yang memandu kehidupan manusia. Dalam konteks bangsa, filsafat budaya bangsa menelaah bagaimana unsur-unsur kebudayaan membentuk karakter nasional dan bagaimana budaya tersebut berinteraksi dengan kebudayaan global tanpa kehilangan jati diri dari suatu bangsa.

Pandangan lain datang dari Edward B. Tylor, yang menafsirkan kebudayaan sebagai "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat." Dalam hal filsafat budaya bangsa, aspek - aspek ini dijadikan objek kajian untuk memahami bagaimana kebudayaan mempengaruhi keberlangsungan suatu bangsa.

a) Karakteristik Filsafat Budaya Bangsa

1. Menyatukan Identitas Nasional

Filsafat budaya bangsa mengintegrasikan berbagai unsur budaya lokal menjadi satu identitas bersama yang mewakili karakter dari suatu bangsa. Misalnya, dalam konteks Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara yang beragam baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

Keberagaman budaya lokal seperti adat istiadat, seni, dan bahasa daerah menjadi bagian dari identitas nasional dari suatu Bangsa Indonesia.

2. Refleksi Kritis terhadap Nilai-Nilai Budaya

Bertens (2006) menegaskan bahwa filsafat budaya tidak hanya menjelaskan kebudayaan, tetapi juga menganalisis norma atau nilai yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Kontekstual dan Adaptif

Menurut Tilaar (2004), filsafat budaya bangsa harus mampu menjawab semua tantangan zaman yang semakin maju seperti globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya asli.

4. Berbasis Kearifan Lokal

Filsafat budaya bangsa memanfaatkan kearifan lokal sebagai pondasi untuk menciptakan keselarasan sosial dalam masyarakat multikultural.

b) Fungsi Filsafat Budaya Bangsa

1. Membangun Identitas Nasional

Sebagai refleksi nilai-nilai kolektif, filsafat budaya bangsa sangat membantu masyarakat dalam memahami dan menjaga jati diri nasional. Hal ini sangat penting untuk memperkuat kebanggaan terhadap budaya bangsa di tengah tantangan globalisasi yang dialami dari segala penjuru dunia yang semakin maju.

2. Melestarikan Warisan Budaya

Pendapat Koentjaraningrat (2009) menekankan pentingnya kebudayaan sebagai warisan yang perlu dilestarikan agar nilai-nilainya tetap relevan dan berguna bagi generasi mendatang. Dengan dilestarikannya budaya asli maka akan semakin mudah bagi generasi mendatang untuk mengenalkan budaya ke seluruh penjuru dunia.

3. Menjaga Keharmonisan Sosial

Dalam masyarakat yang beragam, filsafat budaya bangsa membantu mencari titik temu antara berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya yang berbeda - beda.

4. Memandu Transformasi Budaya

Filsafat budaya bangsa memastikan bahwa perubahan budaya, baik karena modernisasi maupun pengaruh luar, tetap berlandaskan pada nilai-nilai asli bangsa.

c) Contoh Filsafat Budaya Bangsa di Indonesia**1. Pancasila sebagai Dasar Kebudayaan Nasional**

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkaya kebudayaan nasional. Contoh nyata filsafat budaya bangsa Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kearifan Lokal sebagai Sumber Nilai

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan pengalaman hidupnya di lingkungan tertentu. Tradisi gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah bentuk penerapan filsafat budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara.

3. Pemajuan Kebudayaan Nasional

Kebudayaan nasional adalah hasil karya, rasa, dan cipta bangsa Indonesia yang menjadi identitas dan jati diri bangsa. Kebijakan seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan perlindungan budaya lokal mencerminkan implementasi filsafat budaya bangsa untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia.

d) Relevansi Filsafat Budaya Bangsa di Era Globalisasi**1. Mempertahankan Identitas**

Dalam era globalisasi yang semakin maju, filsafat budaya bangsa membantu masyarakat menjaga identitas nasional seperti menggunakan teknologi untuk promosi budaya, menghidupkan tradisi dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat rasa bangga terhadap kebudayaan nasional, megedepankan kearifan lokal dalam menghadapi tantangan global, meningkatkan kerja sama antar generasi tua dan muda agar tidak terputus, agar tidak tergerus dan tidak ditenggelamkan oleh budaya asing.

2. Menjawab Tantangan Modernisasi

Modernisasi adalah proses perubahan menuju keadaan yang lebih maju dari berbagai aspek kehidupan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan

budaya. Upaya menjawab berbagai tantangan modernisasi, seperti melestarikan budaya dan nilai lokal, peningkatan berbagai akses dan pemerataan infrastruktur, menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika untuk membangun karakter, mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif dan meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan nilai sosial.

3. Mengatasi Konflik Antarbudaya

Konflik antar budaya adalah perselisihan yang terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang permasalahannya muncul dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti perbedaan norma, nilai, kebiasaan, bahasa, dan cara pandang masyarakat terhadap permasalahan yang di hadapi. Adapun mengatasi konflik antar budaya sebagai berikut:

- a) Menanamkan rasa toleransi dan empati
- b) Mengutamakan komunikasi yang baik antar budaya
- c) Menciptakan kerja sama antar kelompok dalam proyek sosial, ekonomi, atau lingkungan
- d) Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- e) Memperluas pemahaman antar budaya yang beragam

B. Implementasi Nilai Pancasila

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, tidak hanya sekadar simbol atau ideologi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan di berbagai aspek kehidupan agar tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

a) Pengertian dan Tujuan Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti dasar atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila secara

harfiah dapat diartikan sebagai lima dasar atau lima prinsip. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, yang kemudian dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam buku Soekarno (2005) "Pancasila sebagai Dasar Negara", dijelaskan bahwa Pancasila tidak hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan refleksi dari kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan.

Tujuan utama implementasi Pancasila adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan adil, dimana seluruh warga negara dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan, serta memperoleh hak dan kewajiban secara merata. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

b) Implementasi Nilai Pancasila

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila menekankan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan beragama. Nilai ini mengajarkan tentang penghargaan terhadap hak beragama setiap individu serta pentingnya kehidupan religius dalam masyarakat. Dalam buku Koentjaraningrat (2009) "Pengantar Antropologi Budaya", dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang multikultural dan multiagama harus mampu menjaga rasa saling menghormati antar pemeluk agama.

Implementasi: Pancasila sila pertama ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga toleransi antar umat beragama, serta menghargai perbedaan dalam hal keyakinan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu bebas untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa takut akan diskriminasi. Selain itu, pemerintah mengatur kebijakan yang melindungi hak beragama setiap warga negara.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan. Bertens (2006) dalam "Pengantar Filsafat" menjelaskan bahwa sila kedua ini merupakan landasan bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan keadilan.

Implementasi: Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ini diwujudkan dalam kebijakan yang menjamin hak-hak setiap warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, penerapan nilai ini terlihat dalam penegakan hukum yang adil, dimana tidak ada diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan status sosial, agama, atau latar belakang etnis.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, nilai ini mengajarkan untuk hidup rukun dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Tilaar (2004) dalam bukunya "Membangun Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi" menjelaskan bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai multikultural sangat penting untuk memperkuat persatuan bangsa.

Implementasi: Nilai persatuan ini diwujudkan dalam berbagai program pembangunan yang menysasar daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang, serta dalam penguatan ikatan sosial antar kelompok masyarakat. Selain itu, pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun negara juga menjadi bagian dari implementasi nilai ini.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat mengajarkan bahwa dalam pemerintahan, keputusan harus dibuat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini

menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia didasarkan pada musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Soekarno (2005) menekankan pentingnya nilai musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Implementasi: Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diwujudkan dalam berbagai lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, di mana anggota legislatif mewakili kepentingan rakyat dan membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan perdebatan yang sehat. Selain itu, nilai ini juga terlihat dalam sistem pemilu yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tilaar (2004) dalam "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" menyatakan bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang distribusi kekayaan, tetapi juga tentang kesempatan yang setara dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Implementasi: Nilai keadilan sosial ini diterapkan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal.

c) Tantangan dalam Implementasi Nilai Pancasila

Meskipun nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, fenomena intoleransi dan ekstremisme yang berkembang di masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis berdasarkan Pancasila.

Koentjaraningrat (2009) mencatat bahwa globalisasi dan modernisasi sering kali membawa tantangan berupa perubahan budaya yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk tetap menjaga dan mengimplementasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

C. Permasalahan Moral

a) Pengertian Moral

Menurut Lillie, kata moral berasal dari kata *mores* (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat (Budiningsih, 2004:24). Moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia (Daroeso, 1986:22). Huky (dalam Daroeso, 1986:22) memahami pengertian moral dengan tiga cara:

- a) Moral sebagai tingkah laku manusia yang mendasarkan diri pada kesadaran bahwa ia terkait oleh keharusan mencapai yang baik menurut nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.
- b) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang di pegang teguh oleh sekelompok manusia dalam lingkungan tertentu.
- c) Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

(Daroeso, 1986:23) sendiri menyebutkan pengertian moral sebagai kesusilaan, yaitu keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar.

b) Moral sebagai Sistem Nilai

Moral berfungsi sebagai sistem nilai yang menentukan apa yang baik dan buruk, serta memberikan pedoman untuk bertindak dengan cara yang dianggap benar dan terhormat. Herman Dooyeweerd (2003) dalam "Filsafat Moral", menjelaskan bahwa moralitas adalah sistem nilai yang ada dalam kesadaran individu yang memungkinkan seseorang untuk menilai perilakunya sendiri dan orang lain. Sistem nilai ini berkembang seiring dengan perkembangan kesadaran sosial dan budaya dalam suatu masyarakat.

c) Permasalahan Moral di Mandailing Natal

Permasalahan moral merupakan tindakan manusia yang dilakukan yang tidak sesuai dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat. Dimana peneliti mengambil studi kasus permasalahan moral di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Permasalahan moral ini sudah ada sejak zaman dulu sampai dengan sekarang. Adapun permasalahan moral yang pernah di alami masyarakat Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Pada zaman dulu ,yang lebih dikenal dengan cerita rakyat "Sampuraga". Dalam kisah ini Sampuraga adalah anak yang durhaka terhadap ibunya dan lupa akan asal usulnya setelah Sampuraga mendapatkan pangkat dan kekayaan setelah menikahi putri seorang raja. Dengan meraih kekayaan yang di dapatkannya Sampuraga malu untuk mengakui ibunya yang berasal dari keluarga miskin. Setelah sampuraga tidak mengakui ibunya dan menolak kehadiran ibunya di pernikahannya, dengan perkataan sampuraga yang menyakiti hati ibunya, maka ibunya mengutuk sampuraga dengan adanya bencana banjir sehingga menenggelamkan sampuraga dan penduduknya. Permasalahan moral yang terdapat dalam cerita ini adalah tidak ada penghormatan terhadap orang tua, kesombongan dan lupa diri, dan dengan kesombongannya mendatangkan malapetaka terhadap dirinya dan keluarganya.
2. Pada zaman sekarang, kisah pembunuhan orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Kasus pembunuhan ini berada di Huraba, Kecamatan Siabu. Latar belakang kasus pembunuhan orang tua yang dilakukan anak adalah kesulitan ekonomi, faktor lingkungan (narkoba), kurangnya kesadaran terhadap moral. Permasalah moral yang di alami dalam kasus pembunuhan ini adalah krisis nilai keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga, faktor psikologis dan kejiwaan, sosial dan ekonomi, aspek hukum dan tanggung jawab moral anak, pendapat sosial terhadap keluarga pelaku.

3. Kasus pembunuhan perempuan berusia 19 tahun di Sungai Aek Pohon, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Senin (29 April 2024). Latar belakang permasalahan moral dalam kasus pembunuhan ini berdasarkan pengakuan pelaku adalah dimana korban meminta pertanggung jawaban kepada pelaku untuk dinikahi. Dimana pelaku dan korban sudah menjalin hubungan asmara terlarang selama kurang lebih 1 tahun. Pelaku tidak siap untuk menikahi korban dikarenakan beberapa faktor sehingga membuat mereka bertengkar hingga menyebabkan pembunuhan terhadap korban.
4. Kasus pelecehan terhadap perempuan di Taman Raja Batu, Desa Parbangunan, Panyabungan. Pada tanggal 6 November 2024. Latar belakang terjadinya pelecehan ini adalah kerentanan lokasi, keamanan yang kurang, serta kurangnya menanamkan nilai-nilai moral pada diri sendiri.

d) Upaya Pencegahan Permasalahan Moral di Mandailing Natal

Adapun upaya yang relevan dilakukan untuk mencegah permasalahan moral di Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Menanamkan pendidikan moral dan agama baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan untuk menghindari adanya permasalahan moral dikalangan masyarakat.
2. Peningkatan peran adat dan mora dalam menangani kasus permasalahan moral.
3. Meningkatkan kesadaran terhadap bahayanya tindakan kekerasan dan dampak apa yang di dapatkan dalam permasalahan moral.
4. Pemberdayaan masyarakat dan program pencegahan kekerasan.
5. Pendekatan restorative dan penyelesaian konflik.
6. Peran media dan teknologi untuk menanamkan pentingnya meningkatkan kesadaran moral.

IV. CONCLUSION AND SUGGESTION

Filsafat budaya bangsa merupakan kajian mendalam yang berfokus pada nilai-nilai budaya sebagai identitas dan pembentuk karakter bangsa. Dalam konteks

bangsa Indonesia, filsafat budaya bangsa tidak hanya memperkuat identitas nasional melalui keberagaman budaya lokal tetapi juga menjadi panduan menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi tanpa kehilangan jati diri. Hal ini tercermin dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, permasalahan moral yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti krisis nilai keluarga dan konflik antarbudaya, menggarisbawahi pentingnya pendidikan moral, peran adat, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan sosial. Contoh kasus di Mandailing Natal menunjukkan bagaimana permasalahan moral dapat merusak harmoni sosial, sehingga membutuhkan upaya kolektif, seperti pendidikan moral, pelibatan komunitas, dan penggunaan teknologi untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya.

Dengan demikian, filsafat budaya bangsa berfungsi sebagai landasan reflektif dan normatif dalam menjaga identitas, membangun harmoni sosial, dan memandu transformasi budaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan di tengah dinamika perkembangan zaman.

V. BIBLIOGRAPHY

- Bertens, K. (2001). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia. Bertens, K. (2006). *Pengantar Filsafat*. Jakarta : Gramedia.
- Daroeso, S. (1986). *Moral dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Detikcom. (2024). Deretan Fakta Pria Bunuh Ibu Kandung di Madina Negara Tak Diberi Uang. Retrieved Desember 12, 2024, from <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7647236/deretan-fakta-pria-bunuh-ibu-kandung-di-madina-gegar-tak-diberi-uang>.
- Dooyeweerd, H. (2003). *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap, I. A. (2021). Fenomena Sampuraga Perspektif Masyarakat Desa Sirambas Kabupaten Mandailing Natal. *Studia Sosia Religia*, 34-44. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr>.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kirom, S. (2011). Filsafat ilmu dan arah pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan. *Jurnal Filsafat*.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Polri, D. H. (n.d.). (2024). Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Seorang di Mandailing Natal. Retrieved Desember 12, 2024, from <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/57543-polisi-tangkap-pelaku-pembunuhan-seorang-di-mandailing-natal>.
- Soekarno, I. (2005). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Yayasan Pendidikan.
- Sutono, A. &. (2019). Aksiologi Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 67–86.
- Tilaar, H. A. (2004). *Membangun Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. (2004). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Gramedia.
- Windari, S. &. (2021). Filsafat dalam sistem nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* , 9–15.